PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Kamis Tanggal: 19 Desember 2024 Halaman: 2

Tribun Corner

UMK dan Mimpi Beli Rumah

PENETAPAN Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025 untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membawa harapan baru bagi para pekerja. Namun, di sisi lain, hal ini juga membuka diskusi mendalam tentang kesejahteraan yang sesungguhnya. Kenaikan ini dirasa masih terlalu kecil karena belum sebanding untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Rincian besaran UMK setelah kenaikan 6,5% adalah Kota Yogyakarta Rp 2.655.041,81, Kabupaten Sleman Rp2.466.514,86, Kabupaten Bantul Rp2.360.533,00, Kabupaten Kulon Progo Rp2.351.239,85, dan Kabupaten Gunungkidul Rp2.330.263,67.Ê

Tetapi, apakah itu cukup untuk menjawab tantangan biaya hidup yang terus meningkat, terutama dalam konteks harga kebutuhan pokok dan hunian yang melonjak tajam? DIY selama ini dikenal sebagai daerah dengan biaya hidup relatif rendah. Namun, anggapan tersebut perlahan memudar seiring dengan perubahan signifikan pada harga kebutuhan pokok, transportasi, pendidikan, dan terutama perumahan.

Kota Yogyakarta, yang menjadi pusat perekonomian dan pendidikan di wilayah ini, kini dihadapkan pada realitas bahwa biaya hidup di sana hampir menyamai kota-kota besar lain di Indonesia. Berdasarkan survei, rata-rata kebutuhan hidup layak (KHL) di Yogyakarta mencapai Rp 3,5 juta hingga Rp 4 juta per bulan.

Sementara itu, dengan UMK 2025 yang tertinggi di Kota Yogyakarta hanya Rp 2,6 juta, terjadi kesenjangan yang mencolok antara pendapatan minimum pekerja dengan biaya hidup. Salah satu aspek krusial yang memperberat kondisi pekerja adalah kenaikan harga properti di Yogyakarta. Kota ini telah berubah menjadi salah satu destinasi investasi properti yang menggiurkan, didorong oleh sektor pariwisata yang terus berkembang dan keberadaan institusi pendidikan terkemuka.

Akibatnya, harga tanah dan rumah melambung tinggi, membuat kepemilikan rumah menjadi impian yang sulit dicapai oleh pekerja dengan pendapatan minimum. Sebagai ilustrasi, harga rumah di kawasan strategis Kota Yogyakarta saat ini rata-rata berada di kisaran Rp 700 juta hingga Rp 1 miliar untuk tipe 36Ð45.

Bahkan, di kawasan Sleman atau Bantul yang dulunya dianggap lebih terjangkau, harga rumah kini mulai menembus angka Rp 500 juta. Dengan UMK Rp 2,4 jutaÐ2,6 juta, seorang pekerja membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mampu membeli rumah, itupun dengan asumsi pengeluaran seluruhnya dialokasikan untuk tabungan, tanpa memperhitungkan kebutuhan hidup lain.

Pemerintah DIY menghadapi tantangan besar untuk memastikan kesejahteraan pekerja di tengah kenaikan biaya hidup. Kenaikan UMK, meskipun signifikan secara persentase, tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan kebijakan strategis untuk menekan harga kebutuhan pokok dan menyediakan akses perumahan yang terjangkau.

Jika tidak ada intervensi yang signifikan, UMK hanya akan menjadi angka formalitas yang tidak berdaya menghadapi realitas ekonomi yang keras.Ê Harusnya, DIY dapat tetap menjadi tempat yang istimewa, tidak hanya karena warisan budaya dan sejarahnya, tetapi juga karena keadilan sosial dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakatnya. (***)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005